

Bagaimana kondisi negara dan masyarakat Indonesia sekarang?

INDONESIA (BELUM) MAKMUR & SEJAHTERA





APA
BUKTI
INDONESIA
BELUM
MAKMUR
DAN
SEJAHTERA?

Ini antara lain buktinya...



Kondisi Indonesia

Angka pengangguran yang tinggi. Berdasarkan data Februari 2013, angka pengangguran terbuka usia 15 tahun ke atas adalah 5,92% atau berdasarkan angka absout mencapai 7,170,523 jiwa.¹⁴ Dibandingkan negara maju, angka ini jauh lebih tinggi. Misal Belanda 3,3% atau Denmark 3,7%. Bahkan, dibandingkan negara tetangga, Indonesia juga termasuk tinggi. Misal, Kamboja yang hanya 3,5% pada tahun 2007, Thailand 2,1% pada 2009.¹⁵

Tingkat pendidikan penduduk yang rendah dan angka putus sekolah yang tinggi. Saat ini, rata-rata pendidikan penduduk Indonesia adalah 5,8 tahun atau tidak lulus Sekolah Dasar (SD).¹² Relevan dengan kondisi tersebut, angka putus sekolah pun menjadi tinggi. Setiap tahun, lebih dari 1,5 juta anak tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.¹³


Angka mortalitas ibu hamil dan melahirkan pada 2012, ternyata masih tinggi, yakni 359 per 100.000 kelahiran. Angka ini meningkat tajam dibanding 2007, yakni 228 per 100.000 kelahiran hidup. Secara makro, angka kematian ibu hamil dan melahirkan, merupakan parameter kualitas kesehatan masyarakat pada suatu negara.¹⁶

Pendapatan per kapita (PDB per kapita) Indonesia termasuk rendah. Pada Mei 2013, berada pada angka USD4,000.¹⁰ Bandingkan dengan negara-negara maju, Indonesia jauh tertinggal. Pada 2010 saja, Luksemburg sudah mencapai USD80,288, Qatar 43,100, dan Belanda USD38,618.¹¹

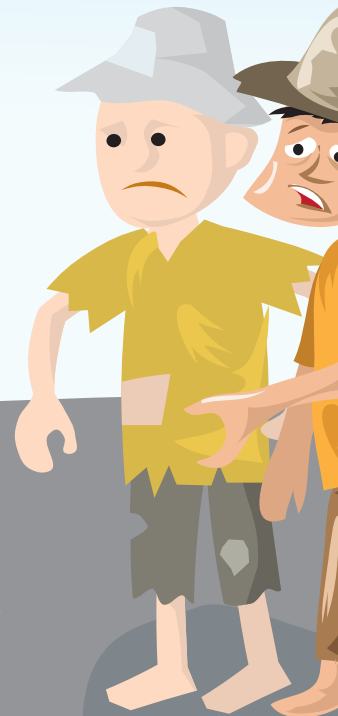
Angka kriminalitas yang tinggi. Setidaknya, setiap 91 detik kejahatan muncul selama 2012.¹⁷ Tindak kriminalitas sendiri, antara lain dipicu oleh tingkat kemiskinan yang tinggi.

Daya beli masyarakat di daerah, rendah. Pada umumnya, perdagangan di daerah itu marak ilegal dengan tidak membayar pajak, tidak resmi, izinnnya banyak dilanggar.¹⁸

Berdasarkan analisis *Revealed Comparative Advantage* (RCA) oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin), lima sektor memiliki daya saing di ambang batas bawah terhadap produk asing, yakni sekitar -3 hingga 0,03. Sektor tersebut adalah pertekstilan, besi dan baja, alas kaki, kimia hilir, serta elektronik.¹⁹



Jadi, Indonesia adalah
negara kaya yang
(belum) makmur dan
sejahtera!



Pasal 33 ayat 3 UUD 1945

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Beginilah Indonesia yang sangat kita cintai. Negeri ini memiliki sumber kekayaan alam berlimpah dan juga berbagai potensi yang luar biasa. Namun, di sisi lain, negeri ini ternyata belum juga bisa keluar dari kondisi keterpurukan ekonomi. Dengan kata lain, kita seakan-akan hidup di tengah lautan paradoks: subur tak juga makmur, kaya tak kunjung sejahtera.

KORUPSI, SALAH SATU PENYEBABNYA!



TIDAK?
PERCAYA!

Bayangkan seandainya Anda
memiliki uang Rp168 TRILIUN ...



Bayangkan, berapa gedung sekolah dasar (SD) baru dapat dibangun?

Asumsi biaya pembangunan ruang kelas baru seluas 64 m^2 adalah Rp101.632.000. Jika sebuah gedung sekolah baru memiliki enam kelas, maka total biaya pembangunan kelas baru sebesar Rp609.792.000.²⁰

Jika gedung baru tersebut dilengkapi dengan satu ruang guru seluas 64 m^2 , satu ruang tata usaha seluas 32 m^2 , satu ruang kepala sekolah seluas 32 m^2 , empat kamar mandi dengan total luas 32 m^2 , maka total biaya yang diperlukan sebesar Rp873.872.000.

Dengan demikian, uang sebesar Rp168 triliun tersebut bisa dipergunakan untuk membangun sekitar 195 gedung baru.

Jumlah itu bisa lebih besar, jika uang sebanyak itu dipergukan tidak untuk membangun sekolah baru, tetapi untuk perbaikannya.

Bayangkan, berapa anak terlantar bisa disekolahkan hingga bangku SMA?

Di Indonesia, biaya pendidikan bukan alang-kepalang tinggi. Tak heran, dibarengi taraf hidup yang jauh dari harapan, banyak anak-anak putus sekolah atau tidak mendapat pendidikan yang layak.

Maka, seandainya uang sebesar Rp168 triliun tersebut dipergunakan untuk membiayai anak-anak tidak mampu dan putus sekolah, berapa anak yang bisa diselamatkan pendidikannya?

Dengan asumsi bahwa biaya pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi mencapai Rp50 juta (besarnya tergantung jenis sekolah), maka jumlah anak yang bisa disekolahkan hingga lulus perguruan tinggi sebanyak 3,36 juta anak.



Bayangkan, berapa penduduk miskin bisa diberi modal untuk berwirausaha?

Dari hasil survei pedagang makanan di Jakarta, rata-rata modal yang mereka butuhkan maksimal Rp5 juta. Modal terbesar diperlukan untuk pembuatan gerobak dan perlengkapannya, yang mencapai Rp3,5 juta. Sedangkan untuk modal lancar, seorang pedagang bakso yang “menghabiskan” 5 kg daging, adalah Rp600 ribu per hari.

Untuk pedagang yang mempergunakan gerobak pikul, biaya yang dibutuhkan bahkan lebih kecil lagi, yakni sekitar Rp2 juta untuk pembuatan gerobak pikul dan perlengkapannya.

Belum lagi untuk modal lancar, pedagang somay rata-rata membutuhkan modal harian sebesar Rp400 ribu, pedagang gorengan Rp300 ribu rupiah.

Dengan asumsi modal termahal, yakni Rp5 juta per orang, maka uang sebesar Rp168 triliun bisa dipergunakan untuk memberi modal kepada 33,6 juta kepala keluarga. Luar biasa, bukan?



Bayangkan, berapa kilometer jalan rusak bisa diperbaiki?

Banyak sekali jalan rusak di negeri ini. Pada September 2013, tercatat 21.313 km jalan kabupaten dan 2.468 jalan provinsi yang rusak dan harus diperbaiki. Lantas, berapa biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki? Kementerian Pekerjaan Umum menyebutkan bahwa kebutuhan dana untuk jalan daerah mencapai Rp118,073 triliun.²¹

Dengan demikian, jika uang Rp168 triliun itu dimanfaatkan, tentu semua jalan rusak bisa diperbaiki.



Bayangkan pula, berapa desa yang bisa dialiri listrik?

Ini tak lepas dari fakta mencengangkan berikut. Di era serba listrik seperti sekarang, ternyata 10.211 desa di Indonesia masih gelap-gulita. Jumlah tersebut, setara dengan 13% desa di seluruh Indonesia yang berjumlah 72.944 desa/kelurahan hingga akhir 2012.²²

Pemasangan infrastruktur baru, tentu bukan satu-satunya. Di daerah yang listriknya kerap padam pun, uang sebanyak itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas pasokan solar dan pemeliharaan infrastruktur.

Dengan uang Rp168 triliun juga, berapa banyak daerah yang listriknya kerap padam karena kurangnya pasokan solar, bisa dinormalkan kembali?

Dan, tentu saja, bukan hanya listrik. Masih banyak yang lain, yang akan sangat terbantu dengan uang sebanyak itu. Maka, bayangkan pula, berapa banyak nyawa bayi terselamatkan, berapa banyak bisa menciptakan sumur-sumur dan sungai-sungai baru agar tidak lagi terjadi banjir, berapa banyak pula mendukung transportasi massal demi mengurangi kemacetan.

Dan, mari bayangkan, bayangkan semua itu... Bayangkan pula fenomena lain yang ada.

Sungguh, Rp168 triliun sangat berarti, bukan?

Tahukah Anda?

Rp168 TRILIUN...

Merupakan estimasi total biaya eksplisit praktik korupsi sepanjang 2001-2012

Dalam suatu persidangan, jaksa selalu menghitung kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi. Uang itulah yang dinikmati para koruptor, yang disebut **biaya eksplisit**. Sepanjang 2001-2012, biaya eksplisit akibat ulah 1.842 koruptor yang diajukan ke meja hijau, adalah sebesar itu tadi. Besarnya itu tadi, Rp168 triliun.²³

Yang lebih mencengangkan (baca: memprihatinkan), **biaya eksplisit** bukanlah satu-satunya kerugian akibat ulah koruptor. Karena selain itu terdapat yang disebut biaya antisipasi korupsi, biaya akibat reaksi terhadap korupsi, dan biaya implisit korupsi. **Biaya antisipasi** merupakan biaya sosial korupsi sebagai bahaya laten. Juga, biaya reformasi birokrasi untuk menurunkan hasrat korupsi. Sedangkan **biaya akibat reaksi** terhadap korupsi, antara lain adalah: biaya peradilan (hakim, jaksa, dan sebagainya); biaya penyidikan, biaya operasional KPK dan PPATK, serta biaya perampasan aset di luar dan dalam negeri.

Adapun **Biaya implisit** merupakan biaya oportunitas korupsi, termasuk di antaranya, beban angsuran bunga di masa mendatang yang timbul karena korupsi di masa sebelumnya. Selain itu, juga merupakan perbedaan ekonomi berantai, antara kondisi terdapat korupsi dan tidak ada korupsi.

Jadi, memang luar biasa kerugian akibat korupsi. Terlebih, biaya eksplisit ternyata merupakan komponen terkecil dari biaya sosial yang diakibatkan korupsi.



Jelaslah sudah, betapa menderita rakyat akibat korupsi. Karena korupsi, kemakmuran seakan-akan hanya utopia, yang entah kapan bisa diraih. Karena korupsi, negeri yang kaya-raya ini, pun masih harus tertatih-tatih secara sosial-ekonomi.

Mengapa bisa begitu? Ya, karena dari biaya eksplisit yang ada, ternyata tidak seluruhnya ditanggung oleh koruptor. Fakta yang ada, hakim hampir selalu memutuskan hukuman lebih rendah ketimbang tuntutan jaksa, baik dilihat dari hukuman fisik maupun denda untuk mengganti kerugian negara yang ada.

Sepanjang 2001-2012, ternyata putusan hakim hanya mewajibkan koruptor membayar sebanyak Rp15 triliun.

Siapa yang menanggung sisanya?

Rp168 triliun – Rp15 triliun = Rp 153 triliun

Ternyata rakyat!

Rakyatlah yang menanggung! Anda, saya, kita semua turut menanggung kerugian negara tersebut.

Apakah Anda rela?



1. Menurut Anda, seberapa besar pengaruh korupsi terhadap belum makmurnya Indonesia?



Tidak ada pengaruhnya




Sedikit pengaruhnya



Besar pengaruhnya

2. Jika ada pengaruhnya? Tuliskan...

- 
3. Ekspresikan sikap dan perasaan Anda terhadap kerugian yang diakibatkan oleh koruptor melalui puisi/gambar/tulisan.

 @KPK_RI #SIAPberAksi

Apakah Korupsi Itu?



Definisi Korupsi:

Berasal dari bahasa latin, *corruptio* atau *corruptus*. Asal kata *Corruptio* adalah *corrumpere*, kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah, turun ke Bahasa Indonesia yaitu *korupsi*. (Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi*)

Korupsi : kejahatan; ketidakjujuran; tidak bermoral; penyimpangan dari kesucian
(*The Lexicon Webster Dictionary*, 1978)

Penyebab Korupsi:

Menurut GONE Theory, faktor-faktor penyebab korupsi meliputi :

1. *Greeds* (keserakahan): berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang.
2. *Opportunities* (kesempatan): berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.
3. *Needs* (kebutuhan): berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar.
4. *Exposures* (pengungkapan): berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan.

Dampak Korupsi, antara lain:

1. Bidang Pendidikan: biaya pendidikan tinggi, angka putus sekolah tinggi, banyak sekolah rusak, dll.
2. Bidang kesehatan: biaya kesehatan tinggi, angka kematian ibu hamil dan menyusui tinggi, tingkat kesehatan yang buruk, dll.
3. Bidang ekonomi: harga-harga melambung, ekonomi biaya tinggi, persaingan pasar yang tidak sehat, dll.
4. Bidang sosial: angka pengangguran tinggi, kemiskinan tinggi, kriminalitas tinggi, kesenjangan antara kaya dan miskin tinggi, dll.
5. Bidang pelayanan publik: tersendatnya pelayanan publik, sulitnya proses perizinan, menurunkan daya tarik investor, dll.
6. Bidang lingkungan: banjir dan bencana alam, penggundulan hutan yang masif, mempercepat laju pemanasan global, dll

Benarkah terdapat korelasi antara peran korupsi dan kesejahteraan?

Apakah benar suatu negara bisa lebih makmur melalui pemberantasan korupsi?



Jika demikian, mengapa kita semua tidak segera berkontribusi memberantas korupsi?

Pemberantasan korupsi adalah pilihan penting dalam rangka menjadikan negara sejahtera!

